

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2007, “Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah”, Yogyakarta : UPP STIM YKPN Yogyakarta
- A.B. Susanto, 2010, “Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah : Bagaimana Membangun Kesejahteraan Daerah”, Jakarta : Erlangga
- Ahmad Mu’am, 2011, “Basis AkruaL Dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia”, Tangerang : Mifaz Rasam Publishing.
- Bagong Suyanto & Sutinah (ed.), 2011, “Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan”, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Binsar H. Simanjuntak, Jurnal “Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia “
- Deloitte Public Sector Paper. *Mastering the Transformation: New Public Management, Accrual Accounting, and Budgeting* (internet file, last updated November 2004)
- Ghozali, Imam. 2009. SPSS. Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Undip: Semarang.
- Indriantoro, Nur dan B. Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi pertama. BPFE: Yogyakarta
- Inpres Nomor : 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mardiasmo. 2006. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- The New Oxford Dictionary of English*, Oxford University Press, 1998
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, “ Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah” diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Polidano, C., *“Why Bureaucrats Can’t Always Do What Ministers Want: Multiple Accountabilities in Westminster Democracies.”* *Public Policy and Administration* 13, No. 1, Spring 1998, p 38.
- Reynaldi Riantiarso & Nur Azlina, 2011, Jurnal “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu)”
- Rowan Jones, Maurice Pendlebury. *Public Sector Accounting*. Financial Times Prentice Hall, 2000
- Slamet Rosyadi, 2010, “Paradigma Baru Manajemen Pembangunan”, Yogyakarta : Gava Media
- Sumiati, Jurnal “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), Akuntabilitas Keuangan, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) (Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Siak)”
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah